



Di sebuah kelas sekolah dasar di Timor Tengah Utara, murid-murid dengan antusias mempelajari susunan huruf dan angka.
(©Tim Komunikasi INOVASI)

Risalah Kebijakan

Mengoptimalkan Pendidikan Inklusif dan Aman Bencana di Kabupaten Timor Tengah Utara

Mendorong Transformasi Sekolah Inklusif dan Tanggap Iklim di Kabupaten Timor Tengah Utara: Strategi Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman dan Setara



Capaian & situasi pembelajaran

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan murid di Kabupaten Timor Tengah Utara menguasai kemampuan dasar dengan cukup baik. Namun, murid perempuan memiliki capaian lebih tinggi dari murid laki-laki. Hal ini turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar yang belum sepenuhnya aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan kebutuhan murid.



Faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid di Kabupaten Timor Tengah Utara meliputi masih adanya perundungan dan kekerasan (khususnya berbasis gender) di sekolah, praktik pendidikan yang belum maksimal mengakomodasi kebutuhan murid disabilitas, serta terbatasnya kesadaran dan pengetahuan mengenai isu dan dampak perubahan iklim.



Rekomendasi kebijakan

Penting bagi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk segera mengambil langkah nyata. Dari pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan: (1) memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang terpercaya dan responsif, (2) mendorong pemenuhan akomodasi yang layak bagi murid disabilitas, (3) memperluas akses bantuan sosial bagi murid dari keluarga miskin, serta (4) menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan.

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan skor literasi dan numerasi murid di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (Kemendikbud, 2022) sebagai berikut:

Literasi : Laki-laki 43,92; perempuan 46,71

Numerasi : Laki-laki 32,74; perempuan 34,81

Masing-masing skor tersebut lebih tinggi sekitar satu poin dari nilai rata-rata provinsi, kecuali skor numerasi laki-laki yang sedikit di bawah nilai rata-rata provinsi. Namun, murid perempuan secara konsisten memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan murid laki-laki.

Berdasarkan temuan riset, pelaksanaan, dan evaluasi program INOVASI, perbedaan capaian murid turut dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar. Sekolah dapat menjadi tempat dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung jika memupuk dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta aksi perubahan iklim. Di Kabupaten Timor Tengah Utara, kesadaran, pengetahuan, dan praktik terkait isu-isu tersebut masih perlu diperkuat.

Temuan Utama

INOVASI telah melakukan pemetaan situasi kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial, serta perubahan iklim dengan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara pada Mei 2025. Dari pemetaan tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lingkungan belajar murid meliputi:



Kesetaraan gender

Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan sebanyak 3-5 dari 10 murid merasa tidak aman dari perundungan (*bullying*), kekerasan fisik, dan kekerasan seksual di sekolah (Kemendikbud, 2024). Perundungan dan kekerasan terjadi antarmurid. Misalnya, murid laki-laki yang senang belajar dan aktif di kelas sering diejek atau diberi nama panggilan tertentu oleh beberapa murid lain. Meski begitu, murid perempuan tercatat dua kali lebih rentan menjadi korban dalam kasus-kasus tersebut. Selain itu, guru masih memberikan hukuman verbal dan fisik pada murid. Kebiasaan semacam ini dapat berdampak pada proses belajar, kepercayaan diri, dan keinginan murid pergi ke sekolah.



Inklusi disabilitas dan sosial

Dari 455 murid penyandang disabilitas (usia 5-18 tahun), sekitar 5% tidak sekolah dan 95% bersekolah. Mereka belajar di sekolah non-inklusi (31%), sekolah inklusi (22%), atau sekolah luar biasa/SLB (42%) (BPS & Kemendikbud, 2023). Namun, bagi mayoritas murid di kelompok ini, akses ke dan di sekolah masih jauh dari memadai. Guru dan tenaga pendukung (guru pendamping dan terapis) dengan kualifikasi khusus, untuk mendukung kebutuhan spesifik mereka, belum banyak tersedia. Stigma sosial tentang disabilitas pun terus berkembang di masyarakat, sehingga mereka seringkali disembunyikan orang tua dan dikucilkan di komunitasnya.

Di sisi lain, masih banyak murid yang termarginalkan. Contohnya, murid dari keluarga miskin, murid dengan orang tua merantau (pekerja migran) atau tidak menikah, murid harus bekerja, murid korban perundungan, murid di daerah terpencil, serta murid belum bisa berbahasa Indonesia.



Perubahan iklim

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)¹ Kabupaten Timor Tengah Utara mencapai 129,08 dari 250. Angka tersebut lebih rendah dari indeks Nusa Tenggara Timur (132,81) dan Indonesia (132,25) (BNPB, 2023). Meski begitu, menurut IRBI, kabupaten ini tetap berisiko tinggi mengalami banjir dan cuaca ekstrem.

Salah satu penyebabnya, kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai perubahan iklim masih terbatas. Tradisi dan kearifan lokal yang bertujuan menjaga alam tidak lagi diturunkan pada generasi muda. Sedangkan, pendidikan perubahan iklim belum masuk dalam kurikulum di sekolah. Kurangnya sumber daya dan infrastruktur (seperti air bersih dan tempat sampah) pun membuat perilaku ramah lingkungan yang diperkenalkan di sekolah sulit diaplikasikan murid di rumah dan tempat-tempat lain.

¹ Penghitungan IRBI terdiri atas komponen bahaya (*hazard*, terkait fenomena alam), kerentanan (*vulnerability*, terkait kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan), serta kapasitas (*capacity*, terkait unsur ketahanan kelembagaan daerah).

Ketiga faktor tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, sosial-budaya, dan geografis (interseksionalitas) berikut ini:



Hambatan majemuk

Kombinasi antara kemiskinan, keterpencilan, migrasi, bahasa, dan gender—misalnya, anak perempuan penyandang disabilitas yang tinggal di daerah terpencil—dapat meningkatkan risiko pengucilan dan hambatan untuk mengakses dan berpartisipasi dalam pendidikan.



Kemiskinan dan budaya patriarki

Anak perempuan dari keluarga miskin biasanya tidak diprioritaskan untuk menempuh pendidikan karena tidak melanjutkan nama atau marga keluarga. Hal ini mencerminkan bias budaya patriarki terhadap perempuan.



Risiko daerah terpencil

Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil harus menghadapi jarak yang jauh, biaya yang mahal, dan risiko bencana untuk mengakses pendidikan, sehingga mereka seringkali putus sekolah dan membantu orang tua bekerja.



Absensi orang tua

Anak-anak yang hidup tanpa orang tua (karena pekerja migran atau ditinggal) rentan mengalami perundungan dan kekerasan. Ada beberapa yang tidak punya dokumen legal, ada yang hidup dengan stigma. Mereka juga tidak memiliki sistem pendukung yang kuat untuk mengawasi dan melindungi mereka serta mendorong akses pendidikan mereka.



Proses pembelajaran murid semakin bermakna saat semuanya memiliki ruang yang setara untuk tumbuh. (©Tim Komunikasi INOVASI)

Rekomendasi Kebijakan

Melihat temuan tersebut, penting bagi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk segera mengambil langkah nyata. Berdasarkan pemetaan situasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan daerah, INOVASI memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah. Kebijakan ini akan berkontribusi langsung pada peningkatan capaian belajar dan kesejahteraan murid.



Dinas Pendidikan: Memperkuat sistem pencegahan, pelaporan, dan penanganan kekerasan yang terpercaya, responsif, dan efektif

1. Memperkuat kapasitas dan peran Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat kabupaten dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah. Satgas dan TPPK dapat mengadvokasi program pencegahan kekerasan (pendidikan karakter dan tindakan disiplin positif), mengawasi proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan, memfasilitasi layanan pendampingan yang dibutuhkan murid, serta menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi murid yang terlibat.
2. Bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyelenggarakan forum mengenai anak dan kesetaraan gender, baik di tingkat desa maupun kabupaten. Forum ini bertujuan mensosialisasikan pentingnya perlindungan dan perlakuan yang setara terhadap anak dalam pendidikan, juga menginisiasi pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) atau Komite Perlindungan Anak Daerah (KPAD) di tingkat desa dan kabupaten.



Dinas Pendidikan & Dinas Sosial: Mendorong pemenuhan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi murid penyandang disabilitas

1. Mengupayakan pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati tentang pendidikan inklusif. Regulasi ini bertujuan menetapkan perencanaan, pendanaan, dan tanggung jawab sekolah dalam memberikan pelayanan dan akomodasi yang layak bagi murid penyandang disabilitas.
2. Mengumpulkan data terkait ragam, tingkat kesulitan, dan kebutuhan murid penyandang disabilitas secara berkala dan mengelolanya secara terpusat melalui *dashboard* Profil Belajar Siswa (PBS), yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, data disabilitas bisa menjadi landasan pembentukan kebijakan dan pemberian dukungan untuk memenuhi akomodasi murid, khususnya dalam pembelajaran di kelas.
3. Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan di tingkat kabupaten agar murid penyandang disabilitas bisa selalu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
4. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, lalu memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Dengan begitu, penerapan kebijakan dan pemberian dukungan dapat selaras, komprehensif, dan tepat sasaran.
5. Melakukan sosialisasi program pendidikan inklusif, baik secara langsung ke sekolah dan masyarakat, melalui kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, maupun melalui media digital. Sosialisasi ini bertujuan mengurangi stigma sosial dan risiko perundungan terhadap murid penyandang disabilitas.



Dinas Sosial: Memperluas akses program kesejahteraan sosial dan bantuan ekonomi bagi murid dari keluarga miskin

1. Melakukan sosialisasi program dan bantuan (seperti Program Keluarga Harapan dan Program Indonesia Pintar) secara langsung ke masyarakat, terutama bagi murid dari keluarga miskin. Melalui sosialisasi ini, mereka dapat mengetahui dan segera mengakses bantuan pendidikan yang relevan.
2. Bekerja sama dengan sekolah dan organisasi masyarakat untuk mengoptimalkan jangkauan dan akses murid terhadap program dan bantuan pendidikan.



Dinas Pendidikan & Dinas Lingkungan Hidup: Menerapkan kebijakan dan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih berdampak signifikan

1. Mengupayakan pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati tentang integrasi pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum. Regulasi ini bertujuan mengikat setiap sekolah untuk memasukkan isu perubahan iklim dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung perilaku ramah lingkungan.
2. Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan sosialisasi dan simulasi kesiapsiagaan bencana bagi murid di sekolah. Kerja sama ini juga dapat memperkuat koordinasi dan respons terhadap bencana.